

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA GENERASI
MUDA MELALUI PEMANFAATAN SARANA DAN
PRASARANA SENTRAL OLAHRAGA TERPADU
DI DESA TERATAK AIR HITAM
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH :

**JERYAN VIKZU
NPM. 210411003**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA
GENERASI MUDA MELALUI PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI DESA
TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : JERYAN VIKZU

NPM : 210411003

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402


SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008728002

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi


EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SEKRETARIS



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si (Pembimbing I)



2. DESRIADI, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji I)



3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji II)



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi” yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah digunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 20 Februari 2025



JERYAN VIKZU
210411003

MOTTO HIDUP

“Nikmati prosesnya dengan berdoa berserah diri kepada Tuhan, berusaha mengubah keadaan, bersabar menerima ketetapan, belajar dari pengalaman dan kesalahan, terus maju tanpa takut banyaknya rintangan”

(Jeryan_Vikzu)

KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan ilmu untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih telah memberikasih sayang, segala dukungan dan serta nasehatnya dan cinta kasih yang tiada terhingga yang mungkin tidak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih kepada saudara laki-laki dan perempuan saya tersayang yang juga telah memberikan saya semangat. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua ini, dan terima kasih selalu menjadi penyemangat di setiap hariku sampai saat ini.

Untuk Ibu dan Bapak Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang sudah membantu selama ini, sudah memberikan nasehat-nasehat, yang selama ini sudah ikhlas dan untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai sampai di titik ini. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti.

Terima kasih juga untuk teman-teman dan sahabat saya yang selalu membantu, mengajari, dan memberikan nasehat serta semangat dukungan sampai saat ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Negara Angkatan 2021. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi orang banyak maupun untuk lingkungan di masyarakat. Aamiin.

By : Jeryan Vikzu

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA GENERASI MUDA MELALUI PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA SENTRAL OLAHRAGA TERPADU DI DESA TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**JERYAN VIKZU
210411003**

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Sebagai figur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, kepala desa memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik di desa. Selain itu, kepala desa juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat atau daerah dengan masyarakat desa, memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam membina generasi muda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sentral olahraga terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Permasalahan yang ditemukan adalah kurang berperannya pemerintah desa dalam membina generasi muda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sentral olahraga terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan maka diketahui bahwa Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang masih kurang berperan.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pembangunan Sentral Olahraga Terpadu Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. **Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi
4. **Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.

6. Teristimewa untuk Ayahhanda Riswandi dan Ibunda Rosita Ningsih, Abang Ari Setiawan serta Kakak Metria Triksi yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara kelas A Angkatan tahun 2021 yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Teluk Kuantan, 20 Februari 2025

Penulis

Jeryan Vikzu
NPM. 210411003

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO HIDUP	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
II. LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Teori Administrasi Negara	8
2.1.2 Teori Kebijakan Publik	9
2.1.3 Teori Desa	13
2.1.4 Teori Peran.....	16
2.1.5 Teori Pemerintah Desa	19
2.1.6 Teori Pembangunan.....	23
2.1.7 Teori Pembangunan Wilayah	26
2.2 Kerangka Pemikiran.....	29
2.3 Defenisi Operasional	29

2.3.1 Peran Sebagai Motivator	29
2.3.2 Peran Sebagai Fasilitator	30
2.3.3 Peran Sebagai Mobilisator	30
2.4 Konsep Variabel	31
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Infoman Penelitian	32
3.3 Sumber Data Penelitian	33
3.3.1 Data Primer	33
3.3.2 Data Sekunder	33
3.4 Fokus Penelitian	34
3.5 Lokasi Penelitian	34
3.6 Metode Pengumpulan Data	34
3.6.1 Observasi	34
3.6.2 Wawancara	34
3.6.3 Dokumentasi	34
3.6.4 Triangulasi	35
3.7 Metode Analisis Data	35
3.7.1 Pengumpulan Data	36
3.7.2 Reduksi Data	36
3.7.3 Penyajian Data	36
3.7.4 Pengambilan Kesimpulan	36
3.8 Jadwal Penelitian	37
VI. PENUTUP	38
6.1 Kesimpulan	38
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Anggaran Dana Pembuatan Sental Olahraga Terpadu di Desa Tratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	5
2.1 Konsep Variable Penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	31
3.1 Informan Peneliti	33
3.2 Jadwal Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Tratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	29

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem desentralisasi. Dalam UU No.9 tahun 2015 disebutkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia, dengan kata lain desentralisasi memuat tentang penyerahan sebagian tanggung jawab dari yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga pemerintahan daerah sehingga menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah. Dengan adanya desentralisasi diyakini dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Adanya desentralisasi dapat mengontrol dan lebih memfokuskan pada pembangunan pemerataan daerah agar kepentingan-kepentingan masyarakat juga dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2015 tentang desa, perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pemberian kewenangan tersebut memberikan konsekuensi diperlukannya koordinasi dan pengaturan untuk menyelaraskan pembangunan baik ditingkat nasional, daerah maupun antar daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju pada era yang lebih luas. Otonomi memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan sarana-sarana kebijakan yang lebih strategi, berdampak lebih luas terhadap pencapaian sarana-sarana pembangunan nasional maupun provinsi. pemerintahan terbagi atas daerah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Desa sebagai pemerintahan terkecil yang menjadi garda terdepan dalam pemerintahan daerah berhadapan langsung dengan masyarakat dalam mengsejahterakan masyarakatnya yang ada di tingkat bawah. Oleh sebab itu sistem pelaksanaan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dukungan dari pemerintah desa itu sendiri.

Kepala desa merupakan orang yang dipilih serta dipercaya oleh masyarakat didesanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desanya. Kepala desa tersebut dilatih langsung oleh bupati walikota. Berdasarkan undang-undang no. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, kecamatan sudah tidak menjadi wilayah administrasi yang membawahi desa. Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan

urusannya sendiri atau biasa disebut *self-governing community*. Setelah itu, desa diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas pembangunan desa, memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai garis depan yang sangat berpengaruh bagi pembangunan desa. Peran seorang kepala desa merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yaitu berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pasal 67 huruf c menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Pembinaan generasi muda termasuk dalam pembinaan sosial budaya karena menyangkut pembangunan karakter, pendidikan informal, dan kegiatan positif di masyarakat.

Pada era yang berbasis informasi ini, kepala desa akan menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya apabila kepala desa tersebut memiliki kemampuan yang handal serta relevan dengan tuntutan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam hubungan tersebut, kepala desa sebagai pengayom masyarakat dan desainer masa depan masyarakat, jelas memerlukan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan masyarakat dalam situasi yang semakin kompetitif.

Pemerintah desa harus berusaha untuk mengembangkan kemampuan kepala desa sesuai dengan aturan pekerjaan dan rencana pengembangan pembangunan, pada masa yang akan datang berdasarkan proyeksi pengembangan desa yang telah tertuang dalam tujuan jangka panjang dan strategi yang telah dipilih.

Desa Teratak Air Hitam adalah suatu desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya, dimana hal ini menjadi tantangan sendiri bagi kepala desa untuk selalu dapat berperan aktif terhadap berbagai pemberdayaan yang ada, terutama pemberdayaan bidang kepemudaan.

Generasi muda merupakan pilar utama dalam pembangunan, khususnya di pedesaan. Mereka memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan dan penerus pembangunan. Namun, pembinaan generasi muda sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah minimnya akses terhadap kegiatan positif dan edukatif. Kondisi ini juga terjadi di Desa Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di mana generasi muda menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial, meningkatnya pengaruh negatif dari pergaulan bebas, hingga kurangnya sarana untuk pengembangan diri.

Sebagai bagian dari upaya pembinaan, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang telah dibangun menggunakan alokasi dana desa. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Teratak Air Hitam telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan fasilitas olahraga, antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 : Anggaran Dana Pembuatan Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Sarana Dan Prasarana Olahraga	Tahun Pembuatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Lapangan Bola Volly	2018	233.580.00
2	Lapangan Futsal	2019	358.336.110
3	Lapangan Bola Kaki	2019	85.464.614

Sumber : Kantor Desa Teratak Air Hitam

Namun, meskipun sarana olahraga ini telah tersedia, permasalahan utama terletak pada pemanfaatan yang belum optimal. Berdasarkan observasi awal, beberapa tantangan yang dihadapi yaitu minimnya program olahraga yang terstruktur untuk generasi muda, kurangnya inisiatif dari pemerintah desa dalam pemanfaatan pembangunan sentral olahraga terpadu di Desa Teratak Air Hitam.

Kurang berperannya pemerintah dalam pemberdayaan pemuda di desa yang dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, potensi kepemudaan yang harusnya diarahkan atau diorientasikan kepada hal-hal yang lebih produktif, akan tetapi karena ruang kreatifitas dan inovasi yang masih kurang sehingga realitas kepemudaan yang cenderung terbatas. fasilitas tidak memadai seperti prasarana olahraga yang kurang memadai sehingga sulit untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga yang efektif.

Permasalahan lain yaitu kurangnya pendampingan dan monitoring dari pemerintah desa dalam pelaksanaan program sentral olahraga sehingga dapat mengurangi keberhasilan kegiatan olahraga, tidak adanya kerja sama dengan pihak luar, seperti sekolah atau organisasi olahraga, sehingga dapat menghambat perkembangan program sentral olahraga terpadu desa.

Apabila ditinjau dari aspek sosial, terdapat berbagai masalah yang kemudian sering terabaikan dari penglihatan kebijakan pemerintah desa seperti kurangnya usaha yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengantisipasi pemuda dalam usaha pemberdayaan, mendapatkan dorongan dan keterampilan serta informasi yang digunakan untuk kemajuan pembangunan desa ditambah dengan kurang berkembangnya kelembagaan kepemudaan dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi dan memperkuat ketahanan serta perlindungan bagi pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dituliskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran pemerintah desa dalam membina generasi muda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sentral olahraga terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam membina generasi muda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sental olahraga terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan sekaligus berpartisipasi aktif dalam pengembangan pemikiran bagi mahasiswa tentang peran kepala desa dalam membina generasi muda melalui pembangunan sentral olahraga terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan mengasah daya kritis serta menerapkan ilmu dan pemahaman penulis serta sebagai bahan masukan atau kajian dan dasar perkembangan bagi pelaksanaan pemerintah desa dalam membina generasi muda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sentral olahraga terpadu desa.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi negara adalah suatu sistem manajemen dan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai kegiatan administratif dalam rangka mengelola negara secara efektif dan efisien. Administrasi negara mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan kebijakan publik, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi program dan kegiatan pemerintah. Tujuan dari administrasi negara adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan negara secara berkelanjutan.

Menurut Wawan Mulyawan, dkk (2024:7) Pengertian administrasi negara merupakan landasan utama dalam memahami esensi dan ruang lingkup bidang administrasi. Seiring perkembangan zaman, definisi ini mengalami evolusi dan diperkaya dengan pemahaman yang lebih mendalam dari berbagai perspektif teoritis dan praktis. Administrasi Negara tidak hanya mencakup pengelolaan birokrasi pemerintah, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan peran negara dalam pembangunan. Pemahaman yang komprehensif tentang Administrasi Negara menjadi kunci dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang terus berkembang di era modern ini.

Menurut Waldo (dalam Muhammad, 2019:29) mendefinisikan Administrasi Negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Administrasi Negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan urusan Negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara memiliki tujuan, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*) dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak (*social welfare*). Penegasan tersebut sesuai pada argumen yang disampaikan oleh Leonard D. White dalam Budi Nugraha, dkk (2022:11) yang berpendapat bahwa administrasi negara mencakup keseluruhan aktivitas negara untuk merealisasikan kebijaksanaan suatu negara.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mempengaruhi atau mengatur perilaku, kegiatan, atau kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, keamanan, dan lain sebagainya.

Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan tahap-tahap seperti identifikasi masalah, pengumpulan data dan analisis, pembuatan alternatif kebijakan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi.

Adapun menurut Nugroho R dalam Uddin B. Sore dan Sobirin (2017:8) kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus dipatuhi dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi

diberikan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Arafat (2023) kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik juga dapat berupa serangkaian tindakan atau rangkaian keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Carl Freadrich dalam Joko Pramono (2020) “kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Thomas R. Dye dalam Joko Pramono (2020) mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah pindah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan

aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Anderson dalam Irawaty Igrisa (2022) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Nurcholis dalam Irawaty Igrisa (2022), memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada hakekatnya bersifat mengikat dan mengatur kehidupan suatu organisasi/negara.

2.1.3 Teori Desa

Desa adalah suatu wilayah pedesaan yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang hidup dalam suatu komunitas yang relatif kecil. Desa biasanya memiliki kondisi infrastruktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan kota, serta mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau peternak. Desa juga memiliki struktur pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat pemerintahan desa lainnya. Tujuan dari pembentukan desa adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia serta ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Mahardhani (2023:21) desa adalah sebuah entitas masyarakat hukum yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional, dan desa ini berlokasi di wilayah kabupaten. Dalam konteks ini, desa bukan hanya sekedar entitas geografis, tetapi juga merupakan cerminan dari hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Desa merupakan hasil dari interaksi berbagai unsur, termasuk fisiografi (ciri-ciri fisik wilayah), aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling memengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Selain itu, desa juga memiliki hubungan dengan daerah-daerah lain yang dapat mempengaruhi dinamika desa itu sendiri.

Menurut R. Bintarto dalam Mahardhani (2023:23) desa juga bisa dianggap sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan

lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut adalah sebuah wujud atau bentuk yang terlihat di permukaan bumi, yang muncul akibat interaksi antara unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berhubungan, termasuk dalam konteks daerah-daerah tertentu.

N.Daldjoeni dalam Mahardhani (2023:23) mendefinisikan desa secara umum sebagai pemukiman manusia yang terletak di luar kota dan penduduknya umumnya menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertanian atau bercocok tanam. Dalam pandangan ini, desa seringkali menjadi tempat di mana komunitas agraris hidup dan bekerja, bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber penghidupan utama mereka.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam Mahardhani (2023:23) menekankan bahwa desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pemikiran dasar dalam pemerintahan desa melibatkan prinsip-prinsip seperti keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya sebagai entitas geografis, tetapi juga merupakan entitas sosial dan politik yang memiliki peran penting dalam pemerintahan lokal.

Paul H. Landis dalam Mahardhani (2023:24) memberikan definisi yang cukup lengkap mengenai desa beserta ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurutnya, desa memiliki tiga ciri utama:

1. Pergaulan hidup yang saling kenal mengenal, salah satu ciri penting dari desa adalah adanya hubungan yang erat dan akrab antar warga. Di desa, orang-orang saling mengenal satu sama lain, dan ini menciptakan

ikatan sosial yang kuat. Dalam konteks ini, kehidupan sosial di desa cenderung lebih personal dan dekat, karena penduduknya biasanya tidak sebanyak di kota besar.

2. Pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan, ciri kedua adalah adanya rasa persatuan dalam hal suku atau kesukuan. Masyarakat desa sering kali memiliki ikatan yang kuat terhadap budaya, tradisi, dan kebiasaan yang sama. Hal ini mencerminkan adanya solidaritas dan identitas bersama di antara penduduk desa.
3. Cara berusaha yang dipengaruhi oleh alam sekitar, ciri ketiga adalah karakteristik ekonomi desa yang didasarkan pada sektor pertanian atau agraris. Kehidupan ekonomi di desa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, kondisi alam, dan kekayaan alam. Pertanian sering menjadi mata pencaharian utama, sementara pekerjaan yang bukan agraris sering kali bersifat sambilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai pusat kegiatan pertanian dan tradisi lokal, desa menjadi tempat yang menyimpan nilai-nilai kearifan lokal dan identitas budaya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses infrastruktur dan teknologi, desa tetap menjadi basis utama dalam penyediaan pangan, kelestarian lingkungan, dan kehidupan sosial yang saling mendukung. Dengan potensi alam yang melimpah dan ikatan komunitas yang kuat, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, asalkan

didukung oleh kebijakan yang tepat dan pemberdayaan masyarakat yang maksimal.

2.1.4 Teori Peran

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Friedman dalam Erik Setiawan (2016:11) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana

penanggung peran beprilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan, serta menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran kepala desa dalam penyelenggaraan penataan lingkungan menyatakan bahwa peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan.

Menurut Soekanto dalam Erik Setiawan (2016:13) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Adapun peran kepala desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Nurjanah, dkk (2019) yaitu sebagai berikut:

1. Motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat

diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Seorang kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.

2. Fasilitator dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Peran kepala desa sangatlah penting dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Ia berperan sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat, memediasi konflik, dan memastikan kesejahteraan warganya. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat di desanya. Sebagai pengelola keuangan dan aset desa, kepala desa harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya desa. Ia juga bertugas merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, kepala desa berperan dalam membina dan mengembangkan kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, ia juga menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah dan lembaga lain yang terkait dengan pembangunan desa. Singkatnya, kepala desa memiliki peran yang kompleks dan strategis dalam membangun desa.

2.1.5 Teori Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari kata pemerintah dan desa, pemerintah berarti organ yang melaksanakan atau pejabat yang menjalankan kekuasaan negara. Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Pemerintah desa memiliki

kewenangan untuk mengatur berbagai hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat desa, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Kusnendar dalam Siti Hajar (2021:10) mengemukakan bahwa pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional, yang berarti pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat.

Menurut Sugiman dalam Siti Hajar (2021:10) pemerintah desa adalah unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai.

Solekhan dalam Siti Hajar (2021:11), berpendapat bahwa apabila dilihat dari segi fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat ketenteraman.
- e. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
- f. Melaksanakan perselisihan. musyawarah penyelesaian.
- g. Dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa terdiri dari sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di samping melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa melaksanakan wewenang, hak, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah. pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan. upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi, perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan yang ada di tingkat desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. BPD memiliki tugas utama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa .
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.1.6 Teori Pembangunan

Menurut Todaro dalam Syed Agung Afandi, dkk (2022:2) pembangunan harus memiliki tiga sasaran utama yakni pertama, meningkatkan persediaan dan perluasan pemerataan akses terhadap kebutuhan bahan pokok (makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan). Kedua, mengangkat taraf hidup, termasuk meningkatkan penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemaunusiaan, serta mengangkat kesadaran terhadap harga diri, baik secara individu maupun nasional. Ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pembebasan dari sikap sikap budak

dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara lain, namun juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Menurut Todaro dalam Ade Putra, dkk (2023:12) pembangunan harus memiliki tiga sasaran utama yakni pertama, meningkatkan persediaan dan perluasan pemerataan akses terhadap kebutuhan bahan pokok (makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan). Kedua, mengangkat taraf hidup, termasuk meningkatkan penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemaunusiaan, serta mengangkat kesadaran terhadap harga diri, baik secara individu maupun nasional. Ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pembebasan dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara lain, namun juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Menurut Siagian dalam Syed Agung Afandi, dkk (2022:3-4) pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam

Kebutuhan hidup manusia hampir seluruhnya bersumber dari alam.

Kekayaan alam, kesuburan tanah, iklim, potensi hutan, potensi tambang, potensi laut, dan sebagainya, akan sangat mempengaruhi pembangunan. Hal ini terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku

produksi sehingga proses pengolahannya senantiasa berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber daya manusia

Salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar sangat potensial untuk dijadikan sasaran pemasaran hasil produksi, sedangkan kualitas penduduk sangat menentukan besaran produktivitas.

3. Permodalan

Sumber daya modal yang memadai merupakan penunjang dalam pembangunan. Sumber daya modal sangat dibutuhkan negara untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Investasi dibutuhkan untuk menggali dan mengolah kekayaan alam sehingga bernilai ekonomis tinggi dan mampu menunjang kinerja pembangunan.

4. Lapangan kerja

Pengangguran yang disebabkan tidak tersedianya lapangan kerja merupakan masalah terhadap pembangunan. Sebaliknya, ketersediaan lapangan kerja akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan.

5. Keahlian dan kewirausahaan

Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi memerlukan keahlian tertentu. Meski demikian, masyarakat yang memiliki keahlian namun

tidak memiliki jiwa kewirausahaan maka tidak akan menyelesaikan masalah pembangunan. Dengan demikian dibutuhkan keahlian dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat jika pembangunan suatu negara ingin berhasil.

6. Stabilitas politik

Kondisi politik yang tidak stabil sangat menyulitkan terciptanya pembangunan yang baik. Stabilitas politik merupakan modal dasar melakukan aktivitas pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

2.1.7 Teori Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah adalah suatu alur yang bersifat multidimensi, yang di dalamnya mencakup berbagai tindakan yang mengarah pada terjadinya reorganisasi ataupun reorientasi yang menyeluruh terhadap sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan dilaksanakan agar mencapai sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang, dalam pengertian bahwa pembangunan adalah proses kearah kondisi yang lebih baik. Maka dari itu, pembangunan yang diterapkan berupaya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan keamanan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, menciptakan kebebasan baik berupa kebebasan dalam menentukan pilihan di bidang ekonomi, politik, sosial serta keamanan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menciptakan kemandirian bangsa serta bisa menentukan nasib sendiri.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil suatu definisi bahwa proses pembangunan di suatu wilayah ditujukan untuk:

1. Menciptakan "institusi" baru yang mendorong perekonomian daerah.
2. Mengelola industri alternative.
3. Memperbaiki kapasitas pekerja agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik.
4. Mengupayakan pasar yang lebih luas.
5. Terjadinya transfer teknologi.
6. Memberi kesempatan investasi bagi para pengusaha.

Pembangunan wilayah menjadi suatu agenda penting dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya bagi negara yang memiliki karakteristik kepulauan seperti Indonesia, atau negara yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Pada negara dengan karakteristik seperti ini pembangunan wilayah menjadi salah satu alternatif pelaksanaan pembangunan, dengan membagi-bagi wilayah nasional ke dalam region tertentu maka pelaksanaan pembangunan bisa lebih fokus. Dikarenakan pada dasarnya karakteristik region yang berbeda-beda memungkinkan bahwa perkembangan yang terjadi di tiap *region* juga akan berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakmerataan *antarregion* menjadi besar.

Menurut Mahi dalam Budiman (2021:59) pembangunan wilayah, merupakan seluruh usaha yang dilaksanakan dalam menciptakan pembangunan wilayah, yang ditandai dengan terjadinya pemerataan pembangunan pada seluruh

bagian wilayah dan sektor. Salah satu tujuan dari pembangunan wilayah, adalah untuk meminimalisasi timbulnya kesenjangan pembangunan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Menurut Budiman (2021:61-62) secara garis besar, teori pembangunan wilayah di bagi atas 4 (empat) kelompok yaitu:

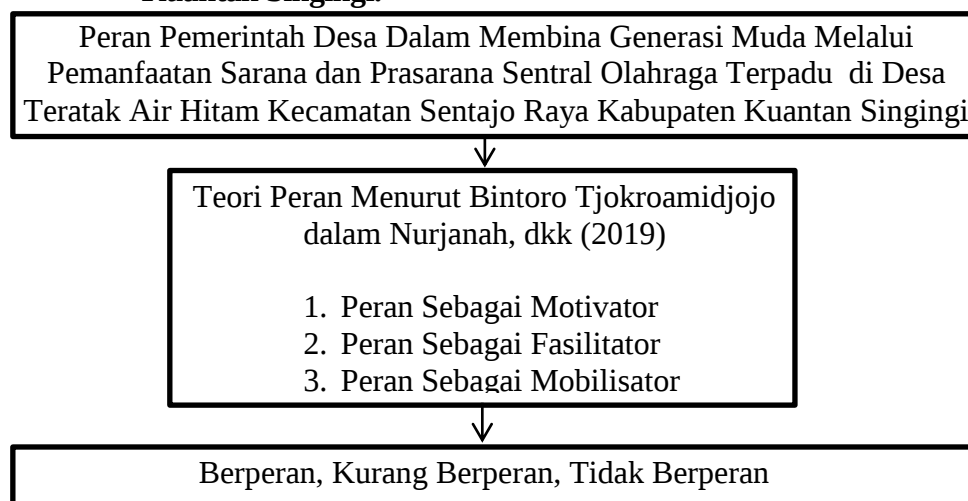
1. Merupakan teori yang memberi penekanan pada kemakmuran wilayah (*local prosperity*).
2. Menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam, yang diyakini sangat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan sistem produksi pada suatu daerah (*sustainable production activity*). Kelompok ini, sering disebut sebagai yang sangat peduli terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
3. Memberikan perhatian pada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga kajiannya terfokus pada *governance* yang bertanggung jawab (*resposnsible*), dan berkinerja baik (*good*).
4. Perhatiannya tertuju pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (*people prosperity*).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan struktur dasar yang menjelaskan alur berpikir dan logika penelitian dengan menghubungkan teori-teori yang relevan, dan konsep-konsep penting. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan bagaimana penelitian akan dilakukan, mulai dari identifikasi

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dan menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi. Dengan demikian, kerangka pemikiran memberikan landasan yang kuat bagi penelitian untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan judul proposal yang diangkat peneliti, maka peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



2.3 Definisi Operasional

2.3.1 Peran sebagai motivator adalah pemerintah desa bertanggung jawab untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat desa agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat desa, serta memberikan dukungan, arahan, dan dorongan agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan efisien. Dengan menjadi motivator,

pemerintah desa dapat membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di antara warganya, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa. Kemampuan pemerintah desa sebagai motivator sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan progresif di desa.

2.3.2 Peran sebagai fasilitator adalah pemerintah desa bertanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi proses pembangunan di desa secara efektif dan efisien. Sebagai fasilitator, pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat desa, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan terselenggaranya berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di desa. Dengan menjadi fasilitator, pemerintah desa diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa dan memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat terimplementasi dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.3 Peran sebagai mobilisator adalah pemerintah desa bertanggung jawab untuk memobilisasi dan mengoordinasikan semua potensi dan sumber daya yang ada di desa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Dengan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, pemerintah desa dapat membangun sinergi dan solidaritas di antara warga desa, sehingga masyarakat desa dapat bekerja bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Pemerintah desa juga dapat mengorganisir program-program

pembangunan dan pengembangan desa yang didukung oleh masyarakat, sehingga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Sebagai mobilisator, pemerintah desa juga bertugas untuk memfasilitasi dialog dan komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, serta berbagai pihak terkait lainnya, sehingga dapat tercapai kerjasama yang saling mendukung dalam memajukan desa. Dengan demikian, pemerintah desa sebagai mobilisator memegang peranan penting dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa.

2.4 Konsep Variabel

Tabel 2.1: Konsep Variabel Penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator
Peran Pemerintah Desa	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu	1.Peran Sebagai Motivator	a.Meningkatkan partisipasi masyarakat b.Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat c.Membangun komunikasi yang efektif
		2.Peran Sebagai Fasilitator	a.Adanya sarana dan prasarana yang lengkap b.Meningkatkan jaringan kerjasama c.Meningkatkan kapasitas masyarakat
		3.Peran Sebagai Mobilisator	a.Adanya pengorganisasian masyarakat b.Meningkatkan kesadaran sosial c.Menciptakan lingkungan partisipatif

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2024.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, situasi, atau peristiwa tertentu secara mendalam dan detail terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang terlihat.

Menurut Moleong dalam Harahap (2020:123) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang memberikan informasi, Informasi ini bisa berupa saksi mata, ahli dalam bidang tertentu, atau orang yang memiliki pengalaman langsung dengan subjek penelitian.

Teknik penyusunan informan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan dengan syarat orang yang paling tau terhadap masalah penelitian.

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No.	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Informan	Jumlah	
1.	Kepala Desa Teratak Air Hitam	1	1	10%
2.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam	1	1	10%
3.	Tokoh Masyarakat	4	4	40%
4.	Tokoh Pemuda	4	4	40%
Total		10	10	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2024

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang di gunakan, antara lain:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara yang di teliti dan jawaban dari daftar pertanyaan yang diajukan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Tratak Air Hitam.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang setelah data primer terpenuhi, yang mencakup data lokasi penelitian serta data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari monografi, literatur, dan buku. Selain itu juga, data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian di Desa Teratak Air Hitam.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing yang terletak di Jalan Lintas Kabupaten.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian atau situasi yang sedang diteliti. Dalam observasi, peneliti secara sistematis mengamati dan mencatat apa yang terjadi, perilaku, interaksi, atau karakteristik dari subjek penelitian tanpa melakukan intervensi atau mengubah situasi tersebut.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam wawancara, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau kegiatan mencatat, merekam, atau mengumpulkan informasi secara tertulis, visual, atau audio. Dalam konteks

penelitian, dokumentasi dapat merujuk pada pengumpulan dan penyimpanan data dalam bentuk dokumen, laporan, catatan lapangan, gambar, atau rekaman suara.

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Abdussamad (2021:156) Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses yang digunakan untuk memahami, mengorganisir, dan menginterpretasikan data kualitatif yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Data kualitatif terdiri dari teks, transkripsi wawancara, catatan lapangan, atau dokumen yang memberikan wawasan tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian.

Menurut Abdussamad (2021:159) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses

pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses menghimpun informasi atau fakta yang relevan dengan tujuan penelitian atau analisis. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengurangi kompleksitas data yang telah dikumpulkan dalam penelitian atau analisis. Tujuan dari reduksi data adalah untuk meringkas, mengorganisir, dan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang data yang telah dikumpulkan.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengkomunikasikan informasi yang terkandung dalam data secara visual atau naratif agar dapat dipahami dengan lebih mudah oleh orang lain. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyampaikan pesan atau insight yang terkandung dalam data dengan cara yang jelas, terstruktur, dan menarik.

3.7.4 Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan proses menarik suatu kesimpulan atau penilaian berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Tujuan dari pengambilan kesimpulan adalah untuk menghasilkan pemahaman atau keputusan yang didasarkan pada bukti atau fakta yang ada. Pengambilan

kesimpulan yang baik harus didasarkan pada analisis yang teliti, pemahaman konteks, dan pertimbangan yang objektif. Selain itu, kesimpulan juga harus dapat dijelaskan dengan jelas dan disampaikan kepada orang lain dengan cara yang mudah dipahami.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024-2025															
		Sep/Okt				Nov/Des				Jan-Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Pembuatan Proposal		■														
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■										
4	Ujian Proposal								■								
5	Revisi Proposal									■							
6	Bimbingan Skripsi										■	■	■				
7	Ujian Skripsi													■			
8	Revisi Skripsi														■	■	■

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2024

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Membina Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sentral Olahraga Terpadu di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang berperan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa mengadakan program pelatihan rutin bagi generasi muda dengan menggandeng pelatih profesional atau komunitas olahraga. Dengan adanya pembinaan yang terarah, potensi anak-anak dan remaja dalam bidang olahraga dapat berkembang secara optimal, bahkan membuka peluang bagi mereka untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.
2. Agar fasilitas olahraga dapat dimanfaatkan dengan maksimal, pemerintah desa perlu memastikan bahwa sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak pakai. Perawatan rutin serta pengadaan perlengkapan olahraga yang memadai akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang tersedia.

3. Sebaiknya pemerintah desa membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti berkolaborasi dengan dinas pemuda dan olahraga, komunitas olahraga, atau sponsor yang dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung berbagai kegiatan di Sentral Olahraga Terpadu Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Memberi bantuan berupa pendanaan, penyediaan fasilitas tambahan, hingga pelatihan dari tenaga profesional akan memperkuat ekosistem olahraga di desa.
4. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya olahraga dalam membangun karakter dan kesehatan generasi muda. Serta melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi desa dalam merancang program kepemudaan berbasis olahraga.
5. Sebaiknya pemerintah desa juga mengembangkan program olahraga yang tidak hanya fokus pada kompetisi, tetapi juga mencakup kegiatan rekreasi dan kebugaran bagi semua kalangan. Misalnya, senam sehat bersama, olahraga tradisional, atau kelas bela diri. Dengan variasi program yang menarik, lebih banyak warga, terutama generasi muda, akan terdorong untuk aktif berpartisipasi.
6. Sentral olahraga terpadu desa Teratak Air Hitam ini sebaiknya mempunyai pengelola supaya tidak terbengkalai. Pengelola yang cocok sebaiknya memenuhi kriteria seperti memahami kebutuhan para

pemuda, memiliki kemampuan manajemen yang baik, dan peduli terhadap pengembangan olahraga.

7. Untuk mengatasi keterbatasan dana, disarankan pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa. Selain itu, Karang Taruna dan masyarakat bisa membantu lewat iuran, donasi, event olahraga, kerja sama CSR dengan perusahaan, atau bantuan dari dinas terkait.
8. Pemerintah desa dan para pemuda perlu memasarkan Sentral Olahraga Terpadu Desa Teratak Air Hitam, disarankan memanfaatkan media sosial desa, grup WhatsApp komunitas, serta memasang spanduk di lokasi strategis sebagai sarana promosi. Selain itu, adakan kegiatan rutin seperti turnamen antar dusun, kompetisi bulanan atau kompetisi yang mengundang pihak kabupaten, untuk menarik minat masyarakat.
9. Untuk meningkatkan penjualan UMKM di sekitar Sentral Olahraga Terpadu Desa Teratak Air Hitam, disarankan mengadakan kompetisi olahraga tingkat desa atau antar desa secara rutin, seperti turnamen sepak bola, voli, atau futsal. Selama acara berlangsung, sediakan area khusus bagi pelaku UMKM untuk menjual makanan, minuman, dan produk lokal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Kualitatif*. Makassar: Cv. Syakir Media Press.
- Afandi, Syed Agung, dkk. 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Cv.Bintang Semesta Media.
- Amane, Ade Putra Ode, dkk. 2023. *Pembangunan Desa*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Arafat. 2023. *Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hajar, Siti. 2021. *Pemerintah Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. Medan: Umsu Press.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Igirisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Indrawan, R & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mahardhani, Ardhan Januar. 2023. *Pemerintah Desa*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimal Press.
- Muljarijadi, Bagdja. 2011. *Pembangunan Ekonomi Wilayah Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. : Unpad Press.
- Mulyawan, Wawan, dkk. 2024. *Buku Referensi Administrasi Negara Prinsip, Praktik, Dan Tantangan*. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nugraha, Budi, dkk. 2022. *Teori Administrasi*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Sore, Udin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

Suparman, Nanang. 2021. *Manajemen Pembangunan Wilayah*. Bandung: FISIP UIN SGD PRESS.

B. Jurnal

Nurjanah, dkk. 2019. “ Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7 (2):929-940 ISSN 2477-2631 (cetak).

C. Website

Bur, Andi Pariruddin. 2019. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pemuda (Studi Kasus Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wajo). Diakses pada 30 Desember 2023 dari http://repository.unhas.ac.id/6606/2/19_P0205216021%28FILEminimizer%29.ok%201-2.pdf

Kristina Pasaribu. 2021. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kec. Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. Diakses Pada 1 November 2024 dari <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15465/2/168510034%20-%20Kristina%20Pasaribu%20-%20Fulltext.pdf>

Setiawan, Erik. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Diakses Pada 15 Desember 2024 dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7898-Full_Text.pdf

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

